

OLIGARKI DAN TERTUNDANYA PEMILU 2022 DI SUDAN PASCA LENGSEARNYA PRESIDEN BASHIR

OLIGARCHY AND THE POSTPONEMENT OF 2022 ELECTIONS IN SUDAN AFTER THE FALL OF PRESIDENT BASHIR

Muhammad Hasan Izzurrahman

Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, SKSG Universitas Indonesia
Jl. Salemba Saya No. 4, RW. 5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430
E-mail: Muhammad.hasan02@ui.ac.id

M. Hamdan Basyar

Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan
E-mail: hbasyar@gmail.com

Diterima: 20 Mei 2022; direvisi 24 Mei 2022; disetujui 22 Juni 2022

Abstract

The fall of President Bashir gave a new direction for Sudan's democracy. The transitional agreement between the military and civilians resulted in an agreement and the 2019 Provisional Constitutional Charter, under which the two parties share power for 39 months. Next on the agenda is the national elections in 2022. However, in October 2021, there was a military coup led by General Burhan against Prime Minister Hamdok. This event annulled the entire contents of the 2019 Provisional Constitution and halted the ongoing transition process. This study aims to analyze the causes of delays in the elections scheduled for 2022 by using the analytical knife of Jeffrey A. Winters' oligarchic theory. The results of this study indicate that the delay in the election was caused by the dominance and oligarchic network consisting of the military and people in the previous regime. The oligarchy almost controls and controls all important economic and political sectors in Sudan.

Keywords: Election postponed, Oligarchy, Military, Civil, Transitional Government

Abstrak

Lengsearnya Presiden Bashir memberikan arah baru bagi demokrasi Sudan. Kesepakatan transisi antara militer dan sipil menghasilkan sebuah perjanjian dan Piagam Konstitusi Sementara 2019, dengan ketentuan kedua pihak berbagi kekuasaan selama 39 bulan. Agenda berikutnya adalah pemilihan umum nasional di tahun 2022. Akan tetapi, pada Oktober 2021, ada kudeta militer yang dipimpin Jenderal Burhan terhadap Perdana Menteri Hamdok. Peristiwa ini membatalkan seluruh isi Konstitusi Sementara 2019 dan menghentikan proses transisi yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tertundanya pemilu yang dijadwalkan pada 2022 dengan menggunakan pisau analisis teori oligarki Jeffrey A. Winters. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tertundanya pemilu diakibatkan oleh dominasi dan jaringan oligarki yang terdiri dari militer dan orang-orang di rezim sebelumnya. Oligarki hampir menguasai dan mengendalikan seluruh sektor penting ekonomi dan politik di Sudan.

Kata Kunci: Pemilu tertunda, Oligarki, Militer, Sipil, Pemerintahan Transisi

Pendahuluan

Peristiwa yang terjadi pada 11 April 2019 menempatkan Sudan di antara harapan dan keputusasaan. Kala itu, sebuah gerakan protes sipil yang paling besar dan berkelanjutan dalam sejarah modern Sudan berhasil menggulingkan Presiden Omar Hassan al-Bashir yang berkuasa sejak 1989. Banyak rakyat Sudan bersuka cita merayakan jatuhnya Bashir yang dianggap bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi serta pelanggaran hak dan kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, para jenderal militer serta jaringan oligarki yang berusaha menenangkan para demonstran telah menunjukkan keengganan untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya ke sipil. Serangan brutal 3 Juni 2019 atas pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa di Khartoum menjadi titik balik paling signifikan, di mana masyarakat internasional menggolongkan dukungan untuk mediasi yang kemudian menghasilkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara militer dan sipil pada 17 Agustus 2019 yang kemudian mengarah pada kontestasi demokrasi.

Langkah-langkah demokratisasi mulai diupayakan, sejak kepemimpinan militer dan sipil menandatangani deklarasi konstitusional yang berisi perjanjian pembagian kekuasaan. Partai-partai segera menunjuk perwakilan ke sebelas anggota Dewan Berdaulat yang akan mengarahkan Sudan menuju ke pemilihan umum yang bebas selama 39 bulan setelah penetapan konstitusi sementara 17 Agustus 2019. Seorang ekonom yang sangat dihormati secara luas, Abdalla Hamdok, ditunjuk menjadi Perdana Menteri empat hari setelah upacara yang berlangsung di Sungai Nil di Khartoum, dan kabinet baru mulai menjabat pada 8 September 2019. Di sisi lain, para jenderal terus memiliki pengaruh yang besar, dan mereka telah menunjukkan sedikit tanda bahwa mereka bermaksud untuk menghormati pilihan rakyat Sudan terhadap pemerintahan yang dipimpin sipil.

Proses transisi yang mengikuti revolusi Sudan memang dirancang untuk menuju pemilihan umum (pemilu) nasional. Pemilu tersebut akan memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan dan kredibilitas transisi politik

di Sudan. Kesepakatan antara Dewan Transisi Militer (TMC) dan gerakan oposisi sipil *Forces for Freedom and Change* (FFC) menghasilkan konstitusi sementara 2019 yang memberikan angin segar bagi demokrasi Sudan, di mana tahun 2022 telah dijadwalkan pemilu nasional. Namun, perjalanan transisi nyatanya membawa banyak risiko yang substansial bagi demokrasi Sudan. Kemudian, risiko menjadi berlipat ganda sejak kepala Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memecat Abdalla Hamdok dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Sudan pada Oktober 2021. Proses pemilu, terutama hasilnya nanti, kemungkinan akan ditentang oleh pemangku kepentingan utama. Lebih jauhnya lagi, akibat pengusiran Hamdok dari posisinya, maka masa depan seluruh proses demokrasi Sudan kembali dipertanyakan.

Mengenai sebak terjang permasalahan pemilu di Sudan, *The Rift Valley Institute* (RVI) sebelumnya telah menerbitkan laporan yang berjudul *Voting for Change: Elections and Political Transformation in Sudan* (2021). Insiden kudeta pada Oktober 2021 nyatanya menimbulkan skeptisisme tentang proses demokrasi tersebut. Namun skeptisisme telah lebih dulu didorong oleh sejarah pemilu yang panjang dan bermasalah di Sudan. Dalam laporannya, rezim sebelumnya kerap memanipulasi hasil pemilu dan hanya mengambil keuntungan bagi mereka serta mengubah pemilu menjadi instrumen untuk politik klientelis. Meskipun demikian, dalam laporan tersebut belum dibahas penyebab tertundanya penyelenggaraan pemilu di Sudan pasca kudeta Bashir. Laporan tersebut lebih fokus pada identifikasi serangkaian kondisi pemilu Sudan dan penjabaran pilihan serta memberikan alternatif yang berbeda bagi masa depan demokrasi Sudan. Laporan itu tidak menawarkan rekomendasi langsung. Meskipun demikian, pilihan mengenai proses pemilihan harus mencerminkan prioritas bagi kemaslahatan lebih luas bagi masyarakat Sudan.

Sementara itu, Gallopin (2020) dalam tulisannya menyebutkan bahwa transisi Sudan ke pemerintahan konstitusional telah gagal akibat dari jenderal-jenderal militer yang terus berkuasa, mengendalikannya jaringan perusahaan

yang luas dan menguasai bank sentral serta Kementerian Keuangan. Dua pemimpin tertinggi militer, Burhan dan Hemeti, disebutkan memiliki jaringan yang kuat dalam menguasai sumber daya negara. Mulai dari industri militer; produksi dan ekspor minyak, emas, gum Arab; impor bahan bakar, gandum; telekomunikasi; perbankan; distribusi air; konstruksi; penerbangan; *real estat*; peternakan; hingga pengelolaan tempat wisata. Di sisi lain, sayap sipil FFC, tidak solid dan enggan menghadapi para jenderal-jenderal yang berkuasa tersebut. Pada kesimpulannya, Gallopin berpendapat bahwa transisi hanya akan berhasil jika pemerintah berhasil menstabilkan ekonomi dan warga sipil bekerja keras untuk memiringkan keseimbangan kekuatan dari militer dan menuju kepentingan sipil dan rakyat Sudan yang lebih luas.

Berangkat dari permasalahan di atas dengan melihat persoalan dalam tubuh pemerintahan transisi dan masa depan demokrasi Sudan bahwa tidak dapat dilepaskan dari dominasi oligarki. Dalam kasus Sudan, oligarki digolongkan dalam militer dan orang-orang di masa rezim Bashir. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tertundanya pemilu nasional Sudan, yang awalnya telah ditetapkan bersama melalui Konstitusi Sementara 2019 yaitu pada 2022. Pengkajian atas masalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Sementara dalam metode analisis data menggunakan metode analisis data mengalir yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan Michael Hubberman (Samsu, 2017), dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk lebih mempertajam analisis masalah tersebut, penulis menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters. Tulisan ini kemudian dibagi dalam beberapa sub judul; yaitu proses transisi pasca lengsernya Bashir, munculnya Piagam Konstitusi Sementara dan JPA, insiden kudeta Oktober 2021, jaringan oligarki di Sudan, masa depan demokrasi Sudan, dan terakhir kesimpulan.

Oligarki : Sebuah Konsep

Studi politik tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan maupun mempertahankan kekuasaan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji perilaku yang dilakukan oleh sekelompok tertentu guna memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, melalui pendekatan teori oligarki, permasalahan yang terjadi di Sudan akan lebih mudah dipahami bersama.

Oligarki sendiri merupakan istilah yang kerap disebut oleh para pengkaji politik, praktisi demokrasi, pengawas pemilu, akademisi, politisi bahkan oligark itu sendiri. Jeffrey A. Winters (2011) secara khusus menjabarkan fenomena oligarki ini berdasarkan konteks cara dan alat berupa sumber daya kekuasaan yang digunakan. Winters (2011) memfokuskan definisi oligarki dalam dua hal. *Pertama*, bahwa oligarki mempunyai basis kekuasaan berupa kekayaan sumber daya yang tidak mudah dibagi bahkan disetarakan. *Kedua*, ia memiliki jangkauan kekuasaan kelompok oligarki minoritas yang luas, sistematis, dan susah dihancurkan sehingga mampu bertahan dalam bentuk pemerintahan apa pun. Oligarki sendiri menurutnya, adalah seorang pelaku yang mempunyai kemampuan mengendalikan sumber daya material yang besar untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi sosial yang eksklusif. Pada saat yang sama, oligarki lebih mengacu pada tindakan politik untuk mempertahankan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Winters (2011) menekankan bahwa tidak hanya sekedar mempertahankan, melainkan termasuk juga menjamin keamanan sumber daya yang dimiliki dari ancaman yang dapat membahayakan keberadaannya.

Teori oligarki dalam pengertian Winters (2011), menapakkan fokusnya pada kekuasaan aktor dengan menggunakan sumber daya material dalam bidang politik dengan dampak ekonomi yang faktual. Sederhananya, oligark dapat menjadi elit dengan kepemilikan sumber daya kekayaan tetapi sebaliknya bahwa elit belum tentu seorang oligark. Namun, elit dan oligarki sama-sama menggunakan

kekuasaan dan pengaruh minoritas, walaupun jenis kekuasaannya sangatlah berbeda. Dalam teori oligarki, pusat perhatian terletak pada kekuasaan pelaku atau aktor yang menggunakan sumber daya material di sektor politik dengan efek ekonomi. Winters juga menyebutkan bahwa teori oligark dan oligarki yang berpusat pada pertahanan kekayaan, maka ia lebih kebal terhadap konflik dan pertentangan pada inti tujuan politik yang terkait mengamankan harta serta menjaga kekayaan. Boleh jadi para oligark tak sepatutnya mengenai banyak hal, namun mereka masih memiliki komitmen ideologis dan praktis dasar terhadap pertahanan kekayaan dan sumber daya.

Satu pondasi penting bagi teori oligarki adalah pandangan sumber daya kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep yang susah didefinisikan, dapat berubah tergantung keadaan. Beberapa bentuk kekuasaan bersifat fisik dan dinyatakan langsung, sedangkan lainnya tidak langsung atau tersembunyi. Beberapa jenis kekuasaan beroperasi secara struktural, kultural, maupun di bawah sadar. Oligarki sendiri diinterpretasi melalui tipe dan ukuran sumber daya kekuasaan yang dikendalikannya. Sudut pandangan ini hanya menilai pada tingkat individu bukan kelompok. Menurut pendekatan ini, seorang presiden, pemimpin gerakan massa, panglima tentara, atau oligark jauh lebih berpengaruh daripada rata-rata orang biasa. Kekuasaan yang dimiliki masing-masing individu dapat membesar ketika para pelaku memiliki jejaring, serikat atau gerakan dengan tujuan yang sama. Terlepas dari itu, Winters menyebutkan bahwa ada lima sumber daya kekuasaan individual: kekuasaan berdasarkan hak politik, jabatan resmi dalam pemerintahan, pemaksaan (koersif), mobilisasi, dan material (Winters, 2011).

Oligarki pun memiliki beragam tipe. Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama: kadar keterlibatan langsung oligark dalam memaksa klaim atau hak milik atas kekayaan; keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintah; sifat keterlibatan dalam pemaksaan kekuasaan, terpecah atau kolektif; dan terakhir oligarki dapat bersifat liar atau jinak. Dari keempat ciri utama tersebut,

Winters juga membagi lagi menjadi empat tipologi: oligarki panglima (*warring*), penguasa kolektif (*ruling*), sultanik, dan sipil (Winters, 2011). Dalam kasus Sudan dan melihat keempat tipologi tersebut, penulis akan fokus pada tipologi oligarki panglima.

Dalam pandangan Winters (2011), oligarki panglima dicirikan oleh perpecahan di antara oligarki di tingkat tertinggi. Umumnya, konflik dan ancaman antara oligarki panglima bersifat lateral, seperti klaim atas wilayah yang tumpang tindih dan kekayaan, sumber daya, dan populasi bawahan. Pemaksaan dan sumber daya material sangat erat terjalin sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Pemaksaan ada untuk mempertahankan kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk mempertahankan paksaan. Winters (2011) menyebutkan bahwa pada dasarnya oligarki panglima didefinisikan oleh konsentrasi tinggi sumber daya kekuasaan material. Perbedaan oligarki panglima dengan tipologi oligarki lainnya pada tiga hal yakni oligark bersenjata secara langsung mempertahankan kekayaan melalui kekerasan dan paksaan, oligark sangat terlibat dalam pemerintahan komunitas, dan selalu berusaha mencapai tujuan mempertahankan kekayaan pribadi dan terfragmentasi.

Oleh karena itu, teori oligarki dengan tipologi oligarki panglima oleh Jeffrey A. Winters dinilai sesuai untuk digunakan dalam menganalisis persoalan penyebab tertundanya pemilu dan keterlibatan para oligark dalam proses revolusi yang berkecamuk di Sudan.

Proses Transisi Pasca Lengsernya Bashir

Ketika protes massa pertama kali meletus, Sudan terus menyaksikan berbagai kekerasan yang mengerikan dengan ketidakpastian rezim Bashir yang tinggal dipastikan jatuh atau hanya mengulur waktu terhadap berbagai bentuk demonstrasi non-kekerasan di berbagai wilayah, khususnya di ibu kota Khartoum. Ribuan orang berkumpul dan berkemah di depan markas militer negara itu selama berhari-hari ketika pasukan keamanan melakukan tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa. Seluruh negeri

terkunci, akses jalanan ditutup dan tak ada jaringan internet. Jatuhnya rezim perlu dan tak terhindarkan. Omar Bashir digulingkan dengan cara yang sama ketika dia berkuasa 30 tahun lalu dalam pengambilalihan militer.

Awalnya, aksi protes dimulai di kota-kota tenggara Khartoum, Damazin dan Sennar pada 13 Desember 2018. Pemicunya adalah kenaikan harga pokok, kekurangan obat-obatan, bahan bakar dan uang tunai. Banyak ATM di bank tidak dapat mengeluarkan uang tunai dan antrian di pom bensin membentang berkilo-kilometer. Partai oposisi, asosiasi profesional dan serikat pekerja berbaris dan melakukan pemogokan massal. Pada 19 Desember, demonstrasi mencapai kota Atbara, kota kereta api dan benteng bersejarah di negara bagian Sungai Nil. Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, misalnya 2011 dan 2013 yang berpusat di Khartoum, aksi demo kali ini berkembang dan meletus di luar ibu kota serta melompati perbedaan geografis dan kelas. Menurut laporan *International Crisis Group* (ICG) tahun 2019, protes baru itu lebih terorganisir melalui komite perlawanan.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah jaringan kelompok yang mewakili dokter, jurnalis, pengacara, guru, insinyur, dan profesi lainnya yang dibentuk pada 2014, menjadi tulang punggung gerakan protes (Abbas, 2019). Pada 1 Januari 2019, SPA berafiliasi dengan 21 organisasi lainnya, termasuk partai oposisi, kelompok pemberontak, dan organisasi sipil, menandatangani Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFC). Deklarasi bersama itu berkomitmen pada perjuangan damai yang ditujukan untuk beberapa tujuan luas: mengakhiri kepresidenan Bashir dan aturan pemerintahannya; pembentukan pemerintahan transisi; diakhirinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa serta pembatasan kebebasan berbicara dan berekspresi; dan keadilan serta akuntabilitas atas kejahatan terhadap rakyat Sudan. Selain itu, DFC juga menandai lahirnya koalisi oposisi sipil *Forces for Freedom and Change* (FFC), yang kemudian menjadi suara resmi gerakan protes sipil (ICG, 2019).

Empat bulan aksi protes telah menguncang pemerintahan Bashir. Demonstrasi, selain dipicu

oleh pengenalan langkah-langkah penghematan pemerintah di tengah krisis ekonomi yang memburuk, pengunjuk rasa menyerukan berbagai keluhan terhadap Bashir, Partai Kongres Nasional (NCP) serta rezim militernya. Di samping rasa frustrasi dengan kondisi ekonomi yang memburuk, para pengunjuk rasa menyebut korupsi, salah urus, dan penindasan oleh rezim. Mereka meneriakkan tuntutan untuk kebebasan, perdamaian, dan keadilan. Seperti halnya kaum muda, perempuan telah menyita perhatian dalam protes. Usia rata-rata yang mengikuti unjuk rasa adalah 18 tahun, banyak dari mereka tidak mengenal pemimpin lain selain Bashir (Blanchard, 2019).

Pada 6 April 2019, para demonstran menempati markas militer di Khartoum dan berbagai instalasi militer di kota-kota lainnya. Polisi anti huru-hara dan personel dari dinas *National Intelligence and Security Service* (NISS) siap memblokir gerak maju para pengunjuk rasa. Pada titik ini, Bashir masih tampak yakin bahwa dirinya dapat mengatasi pemberontakan (ICS, 2019). Tepat pada Kamis, 11 April 2019, militer Sudan mengumumkan Bashir telah digulingkan dan ditangkap melalui sebuah kudeta yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Ahmad Awad ibn Auf. Pengumuman pengambilalihan kekuasaan disiarkan melalui siaran langsung televisi dan radio, militer segera membentuk pemerintah transisi selama dua tahun dengan Letjend Ibn Auf yang akan bertanggung jawab. Selain itu, konstitusi di bawah Bashir telah ditangguhkan, keadaan darurat tiga bulan dan jam malam telah diberlakukan (BBC, 2019). Sementara itu, pengunjuk rasa tidak terima dan meluapkan amarahnya dengan bersumpah tidak akan mengakhiri aksi protesnya selama tuntutan mereka untuk pemerintahan sipil terpenuhi. Tuntutan para pengunjuk rasa termasuk pengadilan atas kejahatan Bashir, pembersihan oligarki dan orang-orang terdekat Bashir, kebebasan berbicara dan berekspresi, serta keadilan bagi para demonstran yang telah terbunuh (Bolaito, 2019).

Muncul dinamika yang menyelumuti proses transisi di mana beberapa anggota Dewan Militer Transisi (TMC) terkait erat dengan rezim NCP. Dipimpin oleh Bashir dan partainya, militer telah

memainkan peran dalam represi politik serta telah terlibat dalam kekejaman massal terhadap warga sipil, terutama minoritas, dalam berbagai gerakan kontra-pemberontakan. Akibatnya, beberapa pengamat berpendapat bahwa mereka yang berada di rezim lama sebagian besar tetap berkuasa, dengan kepemimpinan baru di bawah TMC (Elbagir, 2019). Awalnya, TMC dipimpin oleh menteri pertahanan masa Bashir, Letnan Jenderal Ahmed Awad ibn Auf, yang dipromosikan menjadi Wakil Presiden pada Februari 2019. Pasalnya, Ibn Auf berada di bawah sanksi Amerika Serikat atas perannya dalam kejahatan kemanusiaan di Darfur. Para pengunjuk rasa menolak. Sehari setelah pengumuman penggulingan Bashir, Ibn Auf mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada perwira militer senior lainnya, Jenderal Abdul Fattah al-Burhan dengan wakilnya Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang lebih dikenal Hemeti (Bearak, 2019).

Pengunduran diri Ibn Auf membuka jalan bagi Jenderal Burhan, seorang tokoh tidak dikenal yang telah mengawasi penempatan tentara Sudan di Yaman dan mantan atase militer Sudan di China. Sementara itu, banyak orang percaya bahwa Hemeti-lah sosok yang memaksa Ibn Auf untuk mengundurkan diri, karena dirinya memendam ambisi pribadi untuk supremasi dan memandang Ibn Auf masih terlalu lunak dalam mempertahankan pengaruh militer. Mundurnya Ibn Auf pada akhirnya memberi kepercayaan kepada para pengunjuk rasa. Dalam beberapa hari, sipil mulai melakukan agitasi melawan Burhan. TMC segera mengambil langkah awal penumpasan demonstran dengan membebaskan ratusan tahanan politik, membuka ruang politik, dan membiarkan media beroperasi secara bebas (Sultan, 2019). Di bawah tekanan untuk menahan gelombang revolusi, junta yang kerap menyebut dirinya sebagai TMC mulai negosiasi dengan FFC. Kedua belah pihak mengumumkan kerangka kerja pada 15 Mei untuk pemerintahan transisi tiga tahun yang kemudian mengarah pada pemilu nasional (ICG, 2019).

Pembicaraan dengan oposisi sipil nyatanya mengungkapkan perpecahan di TMC. Beberapa dewan mengungkapkan bahwa kesepakatan itu memberikan kendali sipil yang signifikan

terhadap militer. Sehari kemudian, pada 16 Mei 2019, TMC menanggapi pembicaraan dengan FFC (Al Arabiya, 2019). Di sisi lain, pengunjuk rasa terus meningkatkan tekanan. Pada 28 dan 29 Mei 2019, FFC mengorganisir pemogokan umum yang akibatnya melumpuhkan sebagian besar sistem negara. Kebuntuan berlanjut hingga 3 Juni 2019, ketika pasukan keamanan secara brutal membubarkan demonstrasi. Dilaporkan akibat dari insiden tersebut, serangan itu menewaskan hingga 120 orang dilaporkan tewas dalam serangan oleh NISS dan paramiliter *Rapid Support Force* (RSF), termasuk anggota mantan milisi Janjaweed Darfur (Blanchard, 2019). Setelah pembantaian, pasukan keamanan berkeliaran di jalan-jalan dengan menyerang dan menjarah warga sipil di kota-kota besar, khususnya di Khartoum. Dari beberapa rekaman video yang beredar, menyematkan sebagian besar serangan tersebut terhadap pasukan keamanan dan paramiliter RSF, termasuk anggota mantan milisi Janjaweed Darfur yang dipimpin Hemeti (ICG, 2019).

Tindakan keras berdarah 3 Juni 2019 menandai titik balik. Para elit petinggi tampaknya terus berniat mempertahankan kekuasaan setelah jatuhnya Bashir, sementara pihak oposisi terus mengerahkan puluhan ribu orang Sudan di seluruh negeri untuk pawai “*million-man*” pada 30 Juni 2019. Pada saat yang sama, pembantai 3 Juni juga memicu kemarahan di seluruh masyarakat internasional. PBB, Uni Eropa, dan Uni Afrika mengeluarkan seruan untuk transisi ke pemerintah sipil. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dengan segera menanggapi keanggotaan Sudan. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Arab Saudi dan negara Teluk lainnya untuk menekan TMC agar menyerahkan pemerintah ke sipil. Pada awal Juli 2019, TMC kembali melanjutkan pembicaraan dengan FFC di bawah mediasi Uni Afrika dan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Pada 17 Juli 2019, kedua belah pihak telah mendukung apa yang mereka gambarkan sebagai perjanjian politik yang akan diikuti dengan deklarasi konstitusional resmi yang ditandatangani sebulan kemudian pada 17 Agustus 2019. Kesepakatan pembagian kekuasaan yang dicapai selama musim panas

menetapkan cetak biru bagi pemerintah transisi dan petunjuk untuk transisi 39 bulan ke pemilu nasional (ICG, 2019).

Piagam Konstitusi Sementara 2019 dan Perjanjian Juba

Setelah berhasil menyingkirkan pemerintahan Bashir, para pemimpin revolusi yaitu FFC dan TMC terlibat dalam negosiasi yang melelahkan. Negosiasi tersebut menghasilkan penandatanganan Piagam Konstitusi Sementara untuk Masa Transisi yang dimulai pada 17 Agustus 2019. Kedua pihak menyepakati pengaturan pembagian kekuasaan, di mana TMC akan memimpin Dewan Kedaulatan selama 21 bulan pertama dari masa transisi 39 bulan (Piagam Pasal 7 ayat 1). Menurut Pasal 11 ayat 3, Piagam asli yang tidak diubah pada 17 Mei 2021, FFC akan mengambil alih selama 18 bulan tersisa.

Dalam pembentukan pemerintah transisi, Sudan akan dipimpin dengan tiga struktur dewan. Dewan Kedaulatan dengan 11 anggota yang terdiri dari 5 orang TMC, 5 orang FFC, dan seorang warga sipil yang dipilih bersama dengan masing-masing masa memerintah seperti yang tertera di atas. Dewan ini diketuai oleh Jenderal Burhan dan wakilnya Hemeti. Kemudian Dewan Menteri yang akan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh FFC dan nantinya akan mengangkat para menteri lainnya dari daftar nominasi yang telah diberikan FFC dengan pengecualian menteri pertahanan dan dalam negeri yang nantinya akan dipilih oleh TMC. Terakhir adalah Dewan Legislatif yang akan dibentuk dalam waktu 90 hari sejak pembentukan Dewan Berdaulat (Blanchard, 2019).

Singkatnya, Piagam ini mencakup lima bidang inti: *pertama*, menetapkan jangka waktu dan mandat periode transisi serta menguraikan masalah perdamaian komprehensif yang harus ditangani oleh lembaga-lembaga selama periode tersebut. *Kedua*, mengatur komposisi, susunan dan mandat pemerintahan transisi. *Ketiga*, mengatur jadwal untuk implementasi perjanjian transisi antara FFC dan TMC hingga September 2019. *Keempat*, undang-undang tersebut

bertindak sebagai konstitusi transisi, yang menguraikan resep hukum menyeluruh yang akan mengatur Sudan selama masa transisi. *Kelima*, pembentukan lembaga independen. Di antaranya, mahkamah konstitusi dan yudikatif, kejaksaan, badan dan komisi independen seperti komisi pengawas pemilu dan, secara kritis, Komisi Penyusun Konstitusi dan Konferensi Konstitusi (Wanyoike, 2019).

Perlu diketahui bahwa ada yang menarik dari Piagam Konstitusi Sementara 2019 di dalam bab 6 mengenai ketentuan umum untuk posisi konstitusional. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa anggota Dewan Kedaulatan, Kabinet, menteri atau kepala daerah dan anggota Dewan Legislatif Transisi menyampaikan laporan keuangan termasuk properti dan kewajiban mereka, termasuk pasangan dan anak-anak yang dimilikinya menurut hukum. Pasal 18 ayat 2, ketua dan anggota Dewan Kedaulatan dan menteri, gubernur dan kementerian provinsi atau kepala daerah berjanji untuk tidak menjalankan profesi, kegiatan komersial maupun keuangan selama menjabat. Mereka tidak menerima kompensasi finansial, hibah, atau pekerjaan dalam bentuk apa pun dari entitas non-pemerintah mana pun. Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa ketua dan anggota Dewan Kedaulatan serta menteri, gubernur provinsi, atau kepala daerah, tidak berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang mengikuti masa transisi.

Garis waktu piagam konstitusi sementara diperpanjang dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Juba (JPA) pada 3 Oktober 2020 antara Dewan Penguasa Transisi (TSC) dan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Front Revolusioner Sudan (SRF). Perjanjian tersebut, yang memperluas basis pembagian kekuasaan untuk memasukkan penandatanganan dari gerakan bersenjata dari daerah-daerah terpinggirkan di Sudan yang memerangi rezim Bashir menyatakan bahwa masa transisi 39 bulan akan dimulai kembali dengan ketentuan tanggal penandatanganan JPA (Pasal 2 ayat 1). Signifikansi JPA dalam upaya transisi konstitusional Sudan tidak dapat dilebih-lebihkan. Pencapaian perdamaian adalah salah satu tugas konstitusional terpenting

Pemerintah Transisi. JPA bertujuan untuk mencapai perdamaian ini dengan, antara lain, memberikan gerakan bersenjata tiga kursi di Dewan Kedaulatan dan 25 persen dari Dewan Menteri (Abdulbari, 2022).

Meskipun begitu, Pasal 7 ayat 1 Piagam Konstitusi Sementara menetapkan masa transisi 39 bulan, sedangkan Pasal 11 ayat 3 JPA menetapkan jadwal distribusi internal untuk kepemimpinan Dewan Kedaulatan dengan menggunakan kerangka waktu 39 bulan yang sama yang ditetapkan di Pasal 7 ayat 1 sebelumnya, yang berarti kedua pasal tersebut berbicara tentang periode yang sama namun penetapan pemilu berubah mengikuti perjanjian terbaru. Rujukan JPA tentang masa transisi 39 bulan yang dimulai sejak penandatanganan JPA merupakan pembaruan dari masa transisi Pasal 7 ayat 1. Referensi JPA terus menggunakan istilah "masa transisi", merupakan istilah khusus yang digunakan dalam Piagam dan bukan ide umum. Kesimpulan ini diperkuat oleh fakta bahwa Piagam dan JPA sama-sama mengatur lamanya masa transisi 39 bulan.

Meski pembaruan Pasal 7 ayat 1 masa transisi tidak serta merta mengharuskan dimulainya kembali jadwal distribusi internal Pasal 11 ayat 3, argumen yang mendukung pembaruan semacam itu lebih banyak daripada argumen yang menentang. Karenanya, menurut Nasredeen Abdulbari (2022), perubahan dari Piagam konstitusi ke JPA nyatanya mengubah ketetapan tanggal untuk dimulainya pemilu. Sementara tujuan Piagam Konstitusi Sementara juga mendukung interpretasi Pasal 11 ayat 3 bahwa struktur pembagian kekuasaan yang dimulai kembali ketika periode transisi. Pada akhirnya, semua ini mengarah pada tanggal serah terima baru, yang terhitung sebagai 39 bulan sejak penandatanganan JPA, yaitu tahun 2023 atau awal 2024.

Bagi banyak orang Sudan, ketentuan dari JPA tersebut tampak tidak adil karena menghapus hampir 14 bulan yang telah diketuai oleh pimpinan militer Dewan Kedaulatan sebelum JPA ditandatangani. Namun, ketentuan kedua dokumen konstitusional yang mengikat mengarah pada hasil ini. Secara praktis atau politis, para pemimpin politik Sudan tentu saja

dapat memutuskan untuk mengubah pengaturan, tetapi secara hukum, mereka hanya dapat melakukannya melalui kesepakatan politik yang sah, yang diadaptasi ke dalam tatanan konstitusional melalui amandemen konstitusi. Situasi saat ini, yang secara terang-terangan tidak konstitusional dan tidak demokratis di Sudan mungkin tidak dapat dihindari melalui penyelesaian yang jelas dari pertanyaan-pertanyaan tekstual ini. Bagaimanapun, kepemimpinan militer di Sudan tidak mau terlibat dalam diskusi atau negosiasi hukum bahkan politik yang serius mengenai tanggal penyerahan.

Kudeta Oktober 2021

Melalui kesepakatan bersama antara militer dan sipil, maka pemilu dijadwalkan pada tahun 2022. Namun, peristiwa kudeta Oktober 2021 membuat seluruh prosesnya terhenti dan masa depan demokrasi Sudan kembali tidak jelas. Tepat pada Senin 25 Oktober 2021, panglima Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdul-Fattah al-Burhan memutuskan untuk mengambil apa dia sebut 'tindakan korektif'. Burhan memecat Perdana Menteri Abdulla Hamdok dan menjadikannya tahanan rumah dengan empat tokoh komponen sipil pemerintah lainnya ikut ditahan. Beberapa jam setelah penangkapan, sang jenderal muncul di televisi nasional menjelaskan bahwa dirinya tidak melihat pilihan lain selain mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki jalannya revolusi dan mencegah perang saudara. Burhan menyatakan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah transisi dengan membatalkan pasal-pasal penting dari Piagam Konstitusi Sementara 2019, termasuk ketentuan di dalam bab 6 (Hoffman, 2021).

Lima hari setelah kudeta, pada 30 Oktober 2021, di seluruh Sudan jutaan demonstran menggelar aksi damai turun ke jalan, menentang ancaman dan penggunaan kekerasan berlebihan oleh pasukan keamanan bersenjata lengkap. Tuntutan mereka jelas: pembatalan kudeta dan penyerahan pemerintahan transisi kepada sipil secara penuh. Militer meresponnya dengan aksi kekerasan, pembatasan jaringan internet, pemadaman listrik berskala, dan

penutupan jembatan serta jalan strategis yang sebagian besar dijaga oleh RSF, paramiliter yang terkenal kejam di bawah pimpinan *de facto* RSF Hemeti. Di ibu kota Khartoum saja, setidaknya tujuh demonstran tewas dan lebih dari 140 terluka (Abdelaziz, 2021). Pasalnya dalam beberapa bulan mendatang, Dewan Kedaulatan dijadwalkan untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada salah satu anggota sipil pada Juli 2022 dan kemudian membimbing negara itu menuju pemilu nasional.

Aliansi antara militer dan sipil dengan segera menjadi tegang. Menurut Hoffman (2021), para jenderal militer enggan untuk melepaskan pengaruh serta kekuatan ekonomi dan politiknya. Sebaliknya, mereka terus mempertahankan *status quo*. Militer dianggap kerap menghalangi komitmen yang disetujui bersama menuju keadilan transisional, melangkahi Dewan Menteri, mengobarkan ketidaknyamanan di wilayah pinggiran, mengambil sumber daya dengan keinginannya dan kembali kepada praktik represif. Dengan JPA ditandatangani pada Oktober 2019, sebagian besar dibiayai oleh Arab Saudi dan diatur oleh wakil ketua Dewan Kedaulatan Hemeti, para pemimpin gerakan pemberontak Darfur menjadi terintegrasi dalam pengaturan pemerintah yang sulit, semakin memiringkan keseimbangan kekuasaan ke pihak militer, membuat kabinet Hamdok sulit untuk memajukan reformasi struktural.

Ketua Dewan Kedaulatan Burhan terus menyebarkan narasi dalam membela perebutan kekuasaan dengan menggambarkan dirinya sebagai penjaga revolusi. Namun, klaim tersebut bukanlah hal baru atau menarik. Saat Burhan berbicara pada konferensi persnya sehari setelah kudeta, tentaranya melecehkan para pengunjung rasa damai, wanita dan anak-anak muda. Setiap warga negara Sudan biasa memahami bahwa, alih-alih melindungi Piagam Konstitusi Sementara, dengan kudeta ini Burhan beserta jajaran TMC-nya dengan jelas merusak proses pemerintahan transisi. Ironisnya, jika, seperti yang diklaim oleh para pemimpin militer, perpecahan dan kontroversi di dalam komponen sipil mendorong pengambilalihan militer, kudeta itu telah menyatukan kembali

massa dan berbagai organisasi yang lebih dari sebelumnya.

Dalam pandangan Hoffman (2021), alasan sebenarnya di balik kudeta ada dua unsur: *Pertama*, pengambilalihan kursi Dewan Kedaulatan oleh warga sipil akan menimbulkan ancaman langsung bagi kepentingan dan jaringan bisnis Burhan dan Hemeti yang sebagian besar tidak terkendali. *Kedua*, meningkatnya pengawasan sipil juga mengancam diakhirinya impunitas *de facto* para jenderal tersebut. Di bawah ketentuan perjanjian transisi, penyerahan kepemimpinan Dewan Kedaulatan kepada sipil seharusnya menjadi langkah untuk pertama kalinya dalam dasawarsa bahwa seorang warga sipil memimpin pemerintah Sudan. Militer memiliki banyak ketakutan untuk melewati tonggak penting dalam transisi ini. Di bawah Bashir, para jenderal datang untuk menikmati kendali tak tertanggulangi atas sektor-sektor ekonomi utama, menjalankan jaringan perusahaan dengan aset miliaran dolar. Pemerintah Hamdok telah berusaha untuk mengembalikan hak-hak istimewa ini dengan membawa banyak perusahaan militer beralih di bawah manajemen sipil (ICG, 2021).

Para jenderal juga khawatir tentang prospek bahwa kontrol sipil yang lebih besar dari transisi akan mengarah pada pencarian keadilan yang lebih kuat atas kejahatan yang dilakukan setelah penggulingan Bashir atau yang telah dilakukan untuk menopang rezim lama. Salah satu tuntutan FFC adalah meminta para pejabat transisi untuk bertanggung jawab atas pasukan keamanan yang membantai puluhan pengunjung rasa pada 3 Juni 2019. Banyak dari pejabat ini masih menduduki posisi penting di pemerintahan dan militer. Selain itu, banyak orang Sudan juga mencari keadilan atas kekejaman yang dilakukan selama masa kepresidenan Bashir, termasuk di wilayah Darfur, Sudan barat. Sekali lagi, banyak di antara petinggi yang takut akan tindakan seperti itu, mengingat dugaan keterlibatan mereka sendiri dalam kejahatan semacam itu, sama seperti ketika mereka sangat menentang langkah apa pun untuk memindahkan Bashir ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Beberapa perwira tinggi memiliki hubungan yang dalam dengan NCP Bashir, yang memerintah Sudan selama

tiga dekade (ICG, 2021).

Selain itu, tentara dan RSF sama-sama mengendalikan sekitar 250 perusahaan di berbagai sektor utama termasuk emas, karet, peternakan dan wijen. Semua perusahaan itu dilaporkan melewati pengawasan Kementerian Keuangan dan tidak menghasilkan pendapatan pajak bagi negara ketika Sudan sedang berjuang melawan Krisis ekonomi yang semakin dalam. Menurut laporan Al Jazeera (2020), Burhan telah menolak untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan itu kepada pemerintah dengan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mereka membayar pajak. Di sisi lain, Hamdok mengkritik bahwa hanya 18 persen sumber daya negara berada di tangan pemerintah, karenanya ia berjanji untuk menjadikannya prioritas dalam mengembalikan perusahaan milik sektor keamanan kepada pemerintah. Tidak mengherankan bahwa para jenderal tidak ingin melihat jaringan bisnis mereka dibongkar dan rantai pasokan mereka terputus. Hal ini menjadi jelas ketika Hemeti, dengan lobi intens dari UEA, merebut kembali kursi pimpinan komite darurat ekonomi Sudan, yang telah dialokasikan oleh komponen pemerintah sipil kepada Perdana Menteri. Ini memformalkan dan melegitimasi posisi kekuatan ekonomi *de facto* Hemeti (Gallopini, 2020), menciptakan lebih banyak kelonggaran baginya untuk memajukan kepentingan bisnis pribadi di sektor-sektor utama ekonomi Sudan.

Ancaman lain yang mendorong militer memecat pemerintahan sipil karena menyangkut kekebalan *de facto*-nya dari yurisdiksi kriminal hingga saat ini. Baik Burhan maupun Hemeti diduga terlibat dalam genosida di Darfur. Begitu komitmen Hamdok atas nama sipil untuk menyerahkan Bashir ke ICC di Den Haag diwujudkan menjadi tindakan, maka akan lebih banyak bukti yang memberatkan para jenderal. Begitupun hasil luar biasa dari investigasi pembantaian pada 3 Juni 2019, yang diduga diatur oleh Hemeti dengan dukungan rahasia dari TMC, untuk menghentikan aksi massa. Selain itu, komisi penyelidikan nasional independen atas pembantaian tersebut juga telah dibubarkan oleh Burhan (Hoffman, 2021).

Jaringan Oligarki di Sudan

Mengevaluasi prospek demokratisasi Sudan membutuhkan pemeriksaan lanskap politik yang ditinggalkan Bashir dan memahami bagaimana elemen-elemen di rezimnya bertahan dari keruntuhannya. Jika melihat kasus di seluruh dunia, ancaman terbesar terhadap pemerintahan otokrat datang dari para elit dan oligark, yang memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mempengaruhi aktor politik, begitupun yang terjadi di Sudan. Karenanya, peluang Sudan untuk demokratisasi adalah produk dari perjuangan yang sulit. Selama pemerintahan Bashir, hubungannya dengan elit politik lainnya berkembang dengan baik sehingga terbentuk sekelompok oligark. Bashir berusaha meredakan potensi ancaman dengan memasukkan para oligark dan elit yang sebagian besar setia terhadapnya, sehingga memastikan bahwa posisi kunci akan dipegang oleh individu yang bersedia menggunakan sumber daya negara untuk mendukungnya jika ada masalah di kemudian hari.

Dalam prosesnya, Bashir merekrut banyak tentara, mata-mata, dan pejuang milisi saat dirinya membangun pasukan baru untuk melindungi diri dari segala bentuk ancaman. Misalnya, Bashir memperkuat NISS – sekarang dikenal sebagai *General Intelligence Service* (GIS) – untuk mencegah kudeta oleh SAF. Kemudian, ia mengubah milisi suku pro-pemerintah dari Darfur menjadi RSF, sebuah paramiliter yang dipimpin oleh Hemeti, sebagai jaminan terhadap ancaman dari NISS (Gallopini, 2020). Lebih luas bahwa akses oligark di Sudan dilembagakan melalui partai penguasa, NCP. Setelah pembentukan NCP pada 1998 yang menyerap anggota Front Nasional Islam (NIF), sebuah cabang Ikhwanul Muslimin di Sudan di bawah pimpinan Hassan al-Turabi, dan pembukaan kembali Majelis Nasional pada 1996, para pemimpin partai mulai mengambil posisi yang lebih formal di negara bagian (Hassan & Kodouda, 2019).

Bicara NCP, maka Bashir adalah kuncinya. Menurut Hassan & Kodouda (2019), dalam melihat ancaman dan menjaga kekuasaannya, Bashir mengejar dua strategi utama. *Pertama,*

Bashir memastikan bahwa berbagai cabang aparat keamanan Sudan didanai dengan baik. Beban belanja sektor keamanan dilaporkan mencapai 70 persen dari anggaran nasional 2016. *Kedua*, Bashir berusaha untuk membuktikan kudeta terhadap rezimnya melalui fragmentasi aparat keamanan internal dengan memberikan tanggung jawab yang tumpang tindih, mengurangi jalur komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Secara historis, SAF sengaja dilemahkan oleh Bashir dan NISS dibentuk untuk membungkam oposisi. Kemudian yang paling kontroversial adalah mempersenjatai Janjaweed, milisi suku Arab yang sebagian besar berasal dari Darfur, yang kemudian mengubah faksi tersebut menjadi kelompok paramiliter RSF di bawah kepemimpinan Hemeti.

Pasca jatuhnya Bashir, otomatis kursi komando keseimbangan berbagai lembaga keamanan Sudan kosong. Akibatnya, transisi demokrasi Sudan rentan terhadap pergeseran keseimbangan kekuasaan antara Burhan, Hemeti, kabinet Hamdok, dan kelompok oposisi sipil yang tergabung di FFC. Ketegangan antara mantan anggota rezim Bashir merupakan ancaman paling serius bagi masa depan Sudan. Aturan Bashir bertumpu pada empat pilar: NCP, SAF, NISS, dan RSF. Munculnya Burhan dan Hemeti sebagai pemimpin baru junta militer segera menyingkirkan sipil dan oposisi serta kembali mengorbit beberapa tokoh NCP, yang sebelumnya telah dibubarkan oleh pihak berwenang pada November 2019.

SAF dengan komando Burhan dan RSF di bawah Hemeti kemudian menjadi aliansi yang canggung. Persekutuan keduanya lahir pada April 2019, ketika pembelot perwira SAF berpangkat rendah memaksa para pemimpin militer dan keamanan untuk menggulingkan Bashir guna menghindari kekerasan antara pemberontak dan loyalis. Sejak saat itu, koalisi SAF-RSF telah berpusat pada hubungan pribadi antara Burhan dan Hemeti. Burhan dan Hemeti bersaing di belakang layar untuk mendapatkan akses ke sumber daya, seperti jaringan intelijen NISS di bawah Bashir dulu. Misalnya, RSF dilaporkan telah memburu petugas SAF dengan menawarkan mereka gaji lebih layak. Namun rivalitas keduanya tetap terkendali - untuk saat ini

- sebagian karena kehadiran Hamdok dan FFC, yang memperumit perhitungan strategis SAF dan RSF sekaligus mencegah munculnya garis patahan politik tunggal yang berpusat pada militer dan aparat keamanan.

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Hemeti dan banyak orang di FFC menjadi takut bahwa koalisi mantan pemimpin NCP, perwira NISS, dan perwira Islami di dalam kubu SAF akan mencoba merebut kekuasaan, baik dengan mengacaukan negara atau sebagainya. Kekhawatiran akan destabilisasi Islamis telah marak sejak revolusi, tetapi sulit untuk menilai ancaman yang ditimbulkan oleh mantan pemimpin NCP. Partai membentuk struktur keamanan rahasia yang terdiri dari loyalis, Keamanan Rakyat, yang meliputi semua lembaga negara. Sebagian besar perwira NISS di bawah Bashir setia kepada para pemimpin NCP; di dalam SAF, mereka yang berjanji setia kepada partai dilaporkan berjumlah sekitar 30 persen dari korps perwira, tetapi mereka terorganisir dengan baik. Sekarang setelah banyak pejabat tinggi NCP dipenjara dan realitas kekuasaan telah berubah, tidak jelas seberapa relevan afiliasi masa lalu ini. Beberapa perwira Intelijen Umum, misalnya, kini setia kepada Hemeti (Gallopín, 2020). Permusuhan publik yang meluas terhadap Islam politik sejak revolusi juga akan membuat pengambilalihan oleh Islamis menjadi sulit.

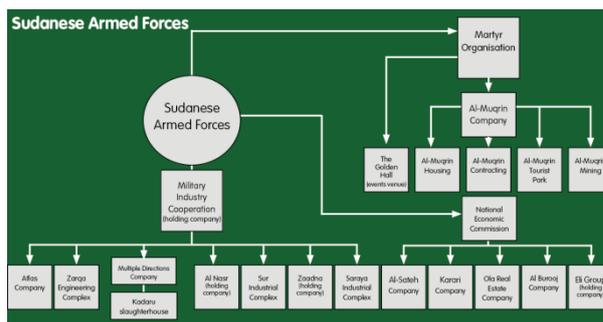
Perlu diingat kembali, alasan Burhan mengambil alih pemerintahan pada 25 Oktober 2021 adalah karena Hamdok ingin memindahkan perusahaan-perusahaan di bawah militer ke pemerintahan sipil. Sudan memiliki beban pajak sekitar 5 persen dari PDB, salah satu terendah di dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan bahwa mobilisasi pendapatan harus menjadi prioritas mendesak bagi pemerintah transisi (Gallopín, 2020). Tidak sulit untuk mengidentifikasi siapa yang akan dikenakan pajak: perusahaan yang dimiliki oleh penguasa NCP, keluarga Bashir, SAF, NISS, dan RSF jelas memainkan peran dominan dalam perekonomian. Hingga kini, mereka masih menikmati manfaat dari tarif dan pembebasan pajak dengan jumlah besar. Mereka ada di mana-mana. Faktanya, sebuah

komite pemerintah anti-korupsi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ditentukan dari FFC mengatakan telah memulihkan antara 1,06 miliar US Dollar dan 3,5 miliar US Dollar berbentuk aset, kebanyakan dari mereka dari para pemimpin NCP dan kroni mereka. Miliaran dolar dana curian dikatakan disimpan di UEA, Inggris, dan Malaysia (Gallopın, 2020).

Lebih lanjut, bahwa beberapa perusahaan yang dimiliki NISS, kerabat dan oligark di sekitar Bashir, serta tokoh NCP merupakan hadiah yang didambakan bagi Burhan dan Hemeti. Keduanya sedang bersaing untuk menguasai sumber daya perusahaan-perusahaan tersebut. Burhan telah menempatkan Perusahaan Industri Militer – sebuah perusahaan induk SAF yang memiliki ratusan perusahaan – bertanggung jawab atas banyak perusahaan yang pernah dimiliki oleh para pemimpin NCP dan keluarga Bashir, sementara RSF telah menguasai banyak bisnis yang sebelumnya dijalankan oleh NISS. Selain itu, militer mempertahankan keuntungan dari perusahaan SAF yang, di bawah rezim sebelumnya, sebagian besar disalurkan ke NCP (Gallopın, 2020).

Dalam laporan *European Council on Foreign Relations* (Gallopın, 2020) tersebut, disebutkan bahwa aparat militer dan keamanan memiliki saham atau perusahaan yang terlibat dalam produksi dan ekspor emas, minyak, gum Arab, wijen, dan senjata; impor bahan bakar, gandum, dan mobil; telekomunikasi; perbankan; distribusi air; properti; konstruksi; pengembangan *real estat*; penerbangan; dan pengelolaan taman wisata dan gedung tempat acara. Perusahaan pertahanan memproduksi AC, pipa air bersih, obat-obatan, produk pembersih, dan tekstil. Mereka mengoperasikan tambang marmer, penyamakan kulit, dan rumah jagal. Bahkan perusahaan yang memproduksi uang kertas Sudan berada di bawah kendali sektor keamanan. Karena militer dan pasukan keamanan adalah aktor utama di pasar impor bahan bakar dan gandum, perusahaan yang dimiliki SAF dan RSF mendapat manfaat langsung dari subsidi komoditas ini. Misalnya, SIN, sebuah perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh NISS dan yang baru-baru ini diambil alih oleh Burhan di bawah otoritas

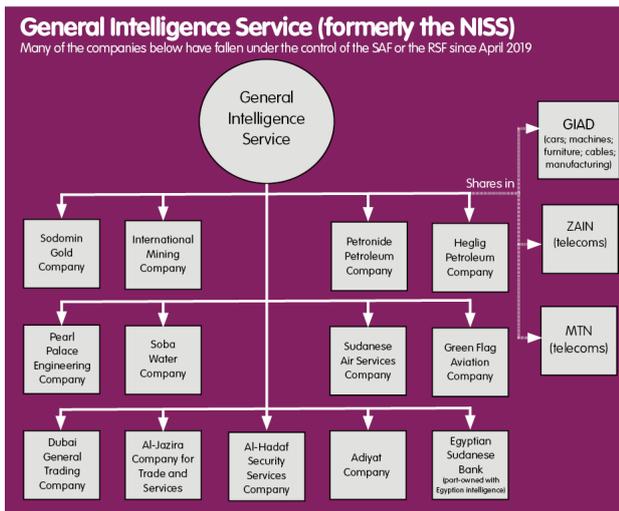
eksklusif SAF, dilaporkan menguasai 60 persen pasar gandum (Gallopın, 2020).



Sumber: *European Council on Foreign Relations* (Gallopın, 2020)

Gambar 1. Jangkauan perusahaan yang dimiliki oleh SAF

Sejak revolusi, Burhan telah menunjuk loyalis untuk mengelola banyak perusahaan yang dikendalikan militer. Misalnya Jenderal Al-Mirghani Idris, teman Burhan di Sekolah Tinggi Militer, sekarang ditunjuk olehnya menjadi kepala Perusahaan Industri Militer. Jenderal Abbas Abdelaziz – mantan kepala RSF yang juga teman dekat Burhan – sekarang bertanggung jawab atas Al-Sati, perusahaan induk lainnya. Mantan teman sekelas lainnya, Jenderal Mohalab Hassan Ahmed, menjadi kepala Organisasi Martir, sebuah perusahaan induk yang sebelumnya mendanai NCP, dan yang memiliki investasi di pertambangan emas dan tempat-tempat hiburan. Kebutuhan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan tampaknya telah mendorong Burhan – yang pada awalnya menyingkirkan banyak perwira Islam terkemuka dari jajaran SAF dan NISS – untuk membawa beberapa teman setianya keluar dari masa pensiunnya. Sementara itu, RSF hingga kini memfokuskan kegiatan komersialnya di pasar emas, konstruksi, kontraktor, dan perdagangan manusia. Pasukan paramiliter di bawah komando Hemeti ini menggunakan mata uang yang diperolehnya dari penjualan emas di Dubai untuk membeli proyek pertanian dan real estat. Dalam satu pembelian baru-baru ini, RSF dilaporkan mengakuisisi 200.000 hektar lahan pertanian di negara bagian Utara; proyek ini melibatkan penggalian saluran irigasi ke Sungai Nil (Gallopın, 2020).



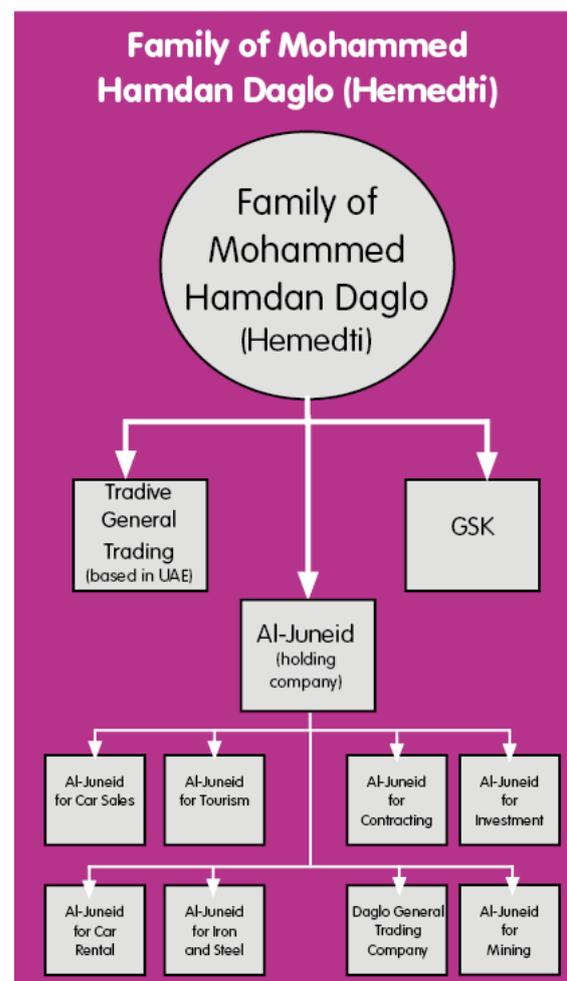
Sumber: *European Council on Foreign Relations* (Gallopin, 2020)

Gambar 2. Jangkauan perusahaan yang dimiliki oleh GIS/NISS

Perusahaan-perusahaan ini diselubungi oleh kerahasiaan; korupsi tingkat tinggi dan konflik kepentingan membuat batas antara dana swasta dan publik keropos. Komite Penghapusan Pemberdayaan Anti Korupsi dan Pemulihan Dana membongkar jaringan kleptokratis di jaringan NCP. Beberapa pemain kunci dari masa pra-revolusi, termasuk Hemeti, masih menempati posisi penting dalam konteks pemerintahan politik dan ekonomi Sudan (Rahman, 2021). Sedangkan perusahaan militer, di sisi lain, secara hukum masih di bawah kepemilikan negara tetapi posisi manajemen mereka memberikan peluang yang menguntungkan untuk penggelapan, yang berarti bahwa penunjukan merupakan bagian dari sistem penghargaan untuk kesetiaan. Hemeti, misalnya, tidak lagi memiliki keterlibatan resmi di Al-Juneid, perusahaan induk yang dijalankan oleh saudaranya, Abdelrahim Daglo. Tidak jelas apakah keuntungan Al-Juneid membiayai operasi RSF, meskipun beberapa sumber percaya bisnis tersebut berada di bawah cabang operasi khusus organisasi (Green, 2019).

Pasalnya, di masa lalu, sistem kapitalisme kroni di bawah rezim Bashir dengan pengaruh NCP yang begitu luas memastikan bahwa perusahaan abu-abu milik negara tersebut menerima perlakuan istimewa dalam mengakses mata uang, regulasi yang longgar dan tidak ada pengawasan sehingga dengan bebas melakukan

praktik pengadaan yang curang, tagihan palsu untuk barang-barang strategis, membayar suap kepada pemasok asing dan pejabat pemerintah yang berwenang, serta kolusi. De Waal (2019) menunjukkan bahwa penyebab struktur bisnis menjadi seperti ini karena sumber utama keuangan politik terletak di bidang pertumbuhan dramatis seperti emas dan perdagangan manusia – tentara bayaran – serta jaringan korupsi di sekitar kapitalisme kroni dan rentierisme minyak. Misalnya saja, seperti yang telah disebutkan di atas, Hemeti semakin dapat meningkatkan otoritasnya pada perdagangan emas demi keuntungannya dan RSF. Selain itu, RSF disinyalir memiliki akun di *National Bank of Abu Dhabi* (NBAD) (Rahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kontrol keuangan kelompok paramiliter tidak terletak pada militer atau komponen sipil di Dewan Kedaulatan.



Sumber: *European Council on Foreign Relations* (Gallopin, 2020)

Gambar 3. Jangkauan perusahaan yang dimiliki oleh Keluarga Hemeti

Menurut Jonas Horner dari *International Crisis Group* (ICG) dalam laporan berita *Independent* (Aboudouh, 2019), bahwa ada kekhawatiran militer tentang transisi demokrasi karena dapat dikenakan keadilan atas pelanggaran yang telah dilakukan, dan militer juga akan kehilangan posisi istimewa yang selama ini mendominasi sektor ekonomi Sudan. Memang Burhan sendiri diduga mengendalikan layanan keamanan dan perusahaan militer ekonomi, termasuk perusahaan yang mengelola rumah jagal dan mengekspor daging. Pada 14 Mei 2020, seorang pejabat senior di Kementerian Keuangan Sudan Ibrahim al-Badawi mengakui tidak ada satu pun keuntungan dari ekspor salah satu perusahaan rumah jagal Hemeti, Kadaru, yang masuk ke Kementerian Keuangan. Senada dengan Kementerian Keuangan, Menteri Perindustrian dan anggota FFC, Ibrahim al-Sheikh juga menyebutkan bahwa Burhan dan juga Hemeti memonopoli kekuasaan melalui empat kelompok yang mengontrol kabinet dan memaksakan agenda partisan mereka. Selain itu, al-Sheikh turut menuduh Burhan dan militer menghalangi reformasi lembaga-lembaga negara, termasuk layanan sipil, peradilan dan sektor keamanan (Sudan Information Service, 2021).

Terlepas dari itu semua, pemerintah Hamdok tidak memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan ini, bahkan akses ke pembukuannya pun tidak tersedia. Para jenderal menggunakan *black market* untuk memastikan pemerintah sipil tetap bergantung pada mereka. Setelah berjanji untuk menyumbangkan 2 miliar US Dollar ke anggaran pemerintah untuk tahun 2020, SAF secara sewenang-wenang mengurangi angka tersebut menjadi 1 miliar US Dollar, menyalahkan penurunan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19. Perusahaan Industri Militer dilaporkan menyumbang 70 juta US Dollar dalam anggaran pemerintah sipil setelah Hamdok menyetujui penyelesaian dengan para korban pengeboman USS Cole pada Oktober 2000 – yang menurut pengadilan AS telah menjadi tanggung jawab negara bagian Sudan – sebagai bagian dari upaya untuk menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Hemeti telah menunjukkan penyerahan konsesinya di Jebel Amer, tambang emas

terbesar Darfur, kepada pemerintah, tetapi nilai fasilitasnya tidak jelas. Selain itu, kontribusinya kepada bank sentral sangat penting dalam memposisikannya sebagai kepala komite ekonomi darurat (Gallop, 2020).

Masa Depan Demokrasi Sudan

Sejak merebut kekuasaan pada 25 Oktober 2021 yang mengakhiri transisi demokrasi dengan membunuh puluhan pengunjuk rasa anti-kudeta dan menangkap ratusan lainnya (Nashed, 2022), para pemimpin militer Sudan telah menyatakan komitmen mereka untuk mengadakan pemilihan nasional yang bebas dan adil pada Juli 2023 dan bahkan ada kemungkinan lebih awal (Hamdan, 2022). Sementara itu, anggota komite perlawanan, kelompok sipil yang mendorong protes melalui koordinasi pawai nasional, mengatakan penindasan brutal terhadap kebebasan sipil hanya akan memperkuat penentangan mereka terhadap kekuasaan militer dan berjanji untuk terus meningkatkan demonstrasi.

Ketika protes terhadap kudeta militer berlanjut dengan seruan populer untuk tidak bernegosiasi dan para pemimpin militer meningkatkan pengaruh mereka, transisi ke pemilihan demokratis tampaknya masih jauh. Meskipun demikian, pemilu dapat membantu mematahkan sejarah otoriter Sudan, tetapi hanya jika proses pemilu dianggap kredibel oleh semua kandidat, baik publik maupun aktor politik sipil. Namun, militer saat ini memiliki kendali penuh atas proses ini, yang jelas akan digunakan untuk memajukan ambisi politiknya sendiri. Mereka dapat menunjuk perwakilan mereka sendiri ke badan penyelenggara pemilu yang tugasnya memantau agar pemilu benar-benar bebas dan adil (Hamdan, 2022). Di lain sisi, mantan Komisi Pemilihan Nasional yang setia kepada Bashir dan dipimpin oleh seorang pejabat NCP telah digantikan oleh komisi baru yang diitunjuk TSC, hingga kini anggota entitas tersebut belum disebutkan namanya hingga akhir tahun 2020, dan TSC belum mengembangkan kerangka hukum dan administratif untuk pemilu (Freedom House, 2021).

Dalam praktiknya, Piagam Konstitusi Sementara saat itu memberikan wewenang

kepada militer untuk menunjuk komisi pemilihan nasional. Para jenderal Sudan dengan jelas memahami pentingnya siapa yang nantinya menjalankan pemilu. Kesepakatan politik yang sudah tidak berlaku antara mantan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menegaskan kembali bahwa Dewan Berdaulat akan menunjuk komisi pemilihan. Mengingat bahwa Burhan, yang juga memimpin Dewan Berdaulat akan sangat memungkinkan menunjuk sekutu militernya untuk mengawasi pemilihan dan berpotensi mengkonsolidasikan kekuatan politik para jenderal dan oligark. Nyatanya, tanpa lembaga penyelenggara pemilu yang independen, aktor politik sipil tidak mungkin mendapatkan perwakilan substansial. Selain itu, otoritas manajemen pemilu yang ditunjuk oleh Dewan Berdaulat akan gagal untuk mendorong legitimasi dari pemilih terbesar di Sudan - suara pemuda (Hamdan, 2022). Karena militer telah membajak revolusi rakyat melalui kudeta, Piagam Konstitusi Sementara 2019 dan kerangka pemilu 2008 tidak berlaku lagi. Jika militer bersikeras mengadakan pemilihan pada Juli 2023, dapat dipastikan bahwa militer tetap berkuasa, hanya kali ini dengan kedok politik demokratis.

Terlepas dari aturan dan kerangka pemilu dan konstitusi sementara yang tidak berlaku lagi serta janji militer untuk mengadakan pemilu pada Juli 2023, ada indikasi yang kuat dari para jenderal militer dan jaringan oligark Sudan untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Di mana beberapa anggota inti NCP telah dibebaskan dari penjara dan diangkat kembali ke posisi penting di dinas intelijen dan birokrasi negara. Beberapa di antara juga mendapatkan kembali aset bernilai jutaan dolar yang disita selama transisi demokrasi. Misalnya Ibrahim Ghandour, mantan menteri luar negeri di bawah pemerintah Bashir, merupakan tokoh sentral NCP dengan profil tertinggi muncul kembali setelah dibebaskan pada 8 April 2022. Kemunculannya pertama kali di hadapan publik disambut dengan pernyataan dukungannya terhadap kudeta Oktober. Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera (Nashed, 2022), Ghandour mengklaim bahwa perebutan kekuasaan oleh para jenderal merupakan langkah perbaikan dan

menggambarkan Sudan telah membaik sejak insiden tersebut.

Ghandour adalah salah satu perwira tertinggi rezim Bashir yang dibebaskan dari penjara sejak militer mengambil alih pemerintahan transisi. Tapi dia bukan satu-satunya. Sejak Oktober 2021, tokoh-tokoh terkemuka dari NCP dan rezim Bashir telah direhabilitasi oleh otoritas militer, baik dengan memberikan pembebasan mereka dari penjara, mengembalikan aset mereka, menjatuhkan tuduhan yang diajukan terhadap mereka selama masa transisi atau menunjuk mereka ke posisi penting negara. Banyak orang di Sudan meyakini bahwa rezim Bashir tidak benar-benar hilang. Burhan secara terbuka kerap mengorbitkan kembali beberapa anggota NCP dan orang-orang di bawah rezim Bashir. Ahmed Ibrahim Ali Mofadl, petinggi NISS, kembali diangkat sebagai direktur jenderal di dinas keamanan (GIS). Pada 19 Januari 2022, menghadapi ketidakmampuannya untuk membentuk pemerintah sipil dalam menggantikan pemerintahan yang telah dibubarkannya dalam kudeta Oktober 2021, Burhan menugaskan kembali para wakil menteri dari orang-orang di bawah rezim Bashir untuk mengambil alih fungsi menteri sementara hingga pemilu diadakan. Di antara mereka adalah Osman Hussein, mantan sekretaris jenderal Kementerian Urusan Kabinet di bawah pemerintahan Bashir serta Ali al-Sadiq yang diangkat sebagai pejabat di Kementerian Luar Negeri, yang selama bertahun-tahun menjadi juru bicara kantor kepresidenan Omar Bashir (Espanol, 2022).

Demikian pula, posisi senior lainnya di negara bagian telah diisi oleh tokoh-tokoh dari rezim Bashir. Pada November 2021, tokoh kontroversial bernama Abdel-Aziz Fathal-Rahman, yang dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung di era Bashir pada 2019, kembali diangkat sebagai ketua kehakiman. Pada 25 Februari 2022, Burhan mengeluarkan dekrit lain yang menunjuk Hussein Yahya Jangool sebagai Gubernur Bank Pemerintah Pusat Sudan, meskipun ia memegang posisi yang sama persis antara Maret 2019 dan Desember 2019 atas dekrit Bashir. Pada 10 April 2022, Burhan mengangkat Muhammad Ibrahim

al-Buzai sebagai direktur Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran Radio dan Televisi. Buzai memegang jabatan tersebut selama periode singkat ketika Sudan diperintah oleh junta militer setelah jatuhnya Bashir (Espanol, 2022). Selain menangkap pemimpin sipil, proses tersebut telah menghasilkan pemulihan kembali setidaknya ratusan orang yang berafiliasi dengan NCP dan rezim Bashir di seluruh sektor ekonomi dan layanan administrasi publik Sudan.

Penutup

Lengsernya Bashir setelah tiga dekade berkuasa berpeluang membawa Sudan pada tatanan kehidupan demokrasi yang baru. Serangkaian proses transisi yang terjadi antara militer dan sipil pada akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian dan piagam bersama, antaranya Piagam Konstitusi Sementara 2019 dan JPA, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan jangka waktu tertentu dengan berujung pada kontestasi demokrasi di tahun 2022. Pada awalnya, pemilu memang dirancang sebagai poin keberhasilan transisi politik di Sudan. Namun nyatanya, insiden kudeta Oktober 2021 yang dilakukan oleh Kepala Dewan Kedaulatan Jenderal Burhan terhadap Perdana Menteri Hamdok memperkeruh masa depan demokrasi Sudan. Secara cepat, Burhan menangkap para pemimpin sipil dan menyerahkan jabatan penting kepada beberapa orang yang memiliki hubungan dengan rezim sebelumnya. Selain itu, kudeta Oktober 2021 juga menandakan bahwa semua perangkat yang terikat dalam perjanjian serta piagam konstitusi antara militer dan sipil tidak berlaku lagi.

Masa depan demokrasi Sudan yang tak menentu, tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan elit dan oligark rezim Bashir. Dalam elit militer muncul dua nama paling sentral, Burhan dan Hemeti. Keduanya memiliki jaringan serta kuasa penuh atas semua sumber daya dan sektor penting lainnya di Sudan. Mulai dari peralatan militer dan senjata, emas, penerbangan, pertanian, peternakan, hingga pengelolaan tempat wisata. Selain itu, para elit jenderal dan oligarki tidak ingin melepaskan pengaruhnya dalam kekuatan ekonomi dan politiknya. Di

bawah rezim Bashir, mereka selalu menikmati kendali penuh atas semua sektor utama dengan aset miliaran dolar. Termasuk kekebalan *de facto* dari yuridiksi kriminal dan segala tuntutan keadilan atas semua kejahatan yang telah dilakukan di beberapa wilayah pinggiran Sudan.

Dalam definisi teori oligarki yang diutarakan oleh Jeffrey Winters bahwa penyebab utama tertundanya pemilu dan kegagalan demokrasi di masa transisi Sudan jelas diakibatkan oleh jaringan oligarki. Para oligarki di Sudan memiliki basis kekuasaan yang luas dengan mencakup kekayaan sumber daya yang tidak mudah dibagi atau disetarakan. Burhan dan Hemeti mempunyai kemampuan dalam mengendalikan sumber daya yang besar dan di saat yang sama, mereka kerap mengacu pada tindakan politik untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya. Burhan tetap berkuasa atas segala hal yang ditinggalkan Bashir terhadap jaringan di SAF, Hemeti dengan kerabatnya menikmati semua fasilitas yang terlimpahkan di RSF dan jaringan oligarki lainnya menikmati sumber daya Sudan melalui badan-badan lainnya seperti GIS. Burhan dan Hemeti juga memonopoli kekuasaan, mengontrol kabinet, dan memaksakan semua agenda partisan mereka. Burhan dan militernya juga kerap menghalangi reformasi lembaga-lembaga negara termasuk layanan sipil, peradilan dan sektor keamanan Sudan. Hal ini menunjukkan bahwa militer dan jaringan oligarki di Sudan memiliki kekuasaan penuh atas sipil dalam bidang ekonomi dan politik.

Daftar Pustaka

- Abbas, R. (28 Januari 2019). *How an illegal Sudanese union became the biggest threat to Omar Al Bashir's 29-year reign*. <https://www.thenationalnews.com/world/africa/how-an-illegal-sudanese-union-became-the-biggest-threat-to-omar-al-bashir-s-29-year-reign-1.819159>, diakses pada 16 April 2022.
- Abdelaziz, K. (26 Oktober 2021). *Seven killed, 140 hurt in protests against Sudan military coup*. <https://www.reuters.com/world/africa/military-forces-arrest-senior-civilian-figures-sudan-al-hadath-tv-2021-10-25/>, diakses pada 19 April 2022.
- Abdulbari, N. (16 Februari 2022). *A Transitional Period Constitutional Question in Sudan*. <https://www.justsecurity.org/80164/a-transitional-period-constitutional-question-in-sudan/>, diakses pada 18 April 2022.
- Aboudouh, A. (19 Oktober 2021). *Sudan's transition at crossroads as the two ruling partners lock horns for political gains*. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sudan-military-civilians-protests-b1941188.html>, diakses pada 22 April 2022.
- Al Arabiya. (16 Mei 2019). *Sudan army ruler says talks over civil rule suspended for 72 hours*. <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2019/05/16/Sudan-army-ruler-says-talks-over-civil-rule-suspended-for-72-hours>, diakses pada 16 April 2022.
- Al Jazeera. (15 Desember 2020). *'Unacceptable': Sudanese PM criticises army's business interests*. <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/unacceptable-sudanese-pm-criticises-armys-business-interests>, diakses pada 19 April 2022.
- BBC. (11 April 2019). *Omar al-Bashir: Sudan military coup topples ruler after protests*. <https://www.bbc.com/news/world-africa-47891470>, diakses pada 16 April 2022.
- Bearak, M. (12 April 2019). *Sudan's Defense Minister, Who Ousted Nation's Longtime Leader, Resigns Just One Day After Takeover*. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/who-is-awad-ibn-auf-sudans-new-leader/2019/04/12/43ffe8b0-5c90-11e9-98d4-844088d135f2_story.html, diakses pada 16 April 2022.
- Blanchard, L. P. (2019). *Sudan's Uncertain Transition*. Congressional Research Service Report.
- Bolatito, A. O. B. (2019). *Sudan Revolution: An Exploration Causes and Consequences for Power Struggle and Regime Change*. <https://ssrn.com/abstract=3502891>, diakses pada 16 April 2022.
- De Waal, A. (2019). Sudan: Political Marketplace Framework Analysis. *World Peace Foundation, Occasional Papers*, 19.
- Elbagir, Y. (2019). *Atrocities in Sudan are a Reminder the Regime Never Left*. <https://www.ft.com/content/70320294-9339-11e9-aea1-2b1d33ac3271>, diakses pada 16 April 2022.
- Espanol, M. (2022). *Coup Generals Bring back Party of Sudan's Ousted Dictator*. <https://www.al-monitor.com/originals/2022/04/coup-generals-bring-back-party-sudans-ousted-dictator>, diakses pada 11 Mei 2022.
- Freedom House. (2021). *Freedom In the World 2021: Sudan*. <https://freedomhouse.org/country/sudan/freedom-world/2021>, diakses pada 10 Mei 2022.
- Gallopin, J. B. (9 Juni 2020). *Bad company: How dark money threatens Sudan's transition*. https://ecfr.eu/publication/bad_company_how_dark_money_threatens_sudans_transition/, diakses pada 19 April 2022.
- Green, S. (2019). *The RSF Empire: An In-depth Analysis into the Rapid Support Forces of Sudan*. Confidential Report.
- Hamdan, A. (2022). *Sudan's Military Are Calling for Elections In 2023: Here Is Why That's a Bad Idea*. <https://www.cmi.no/publications/8119-sudans-military-are-calling-for-elections-in-2023-here-is-why-thats-a-bad-idea>, diakses pada 11 Mei 2022.
- Hassan, M. & Kodouda, A. (2019). Sudan's Uprising: The Fall of a Dictator. *Journal of Democracy, Vol. 30* (4), 89-103.
- Hoffman, A. (2021). *Military Coup Betrays Sudan's Revolution: Scenarios to Regain the Path Towards Full Civilian Rule*. Clingendael Netherlands Institute of International Relations.
- Humanitarian Aid Relief Trust. (2019). *Sudan Briefing: May - July 2019 Timeline of Events*. <https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-briefing-may-july-2019-timeline-events>, diakses pada 17 April 2022.

- International Crisis Group. (2019). Safeguarding Sudan's Revolution. *International Crisis Group (ICG): African Report No. 281*.
- International Crisis Group. (26 Oktober 2021). *Reversing Sudan's Dangerous Coup*. <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/reversing-sudans-dangerous-coup>, diakses pada 19 April 2022.
- Juba Agreement. (2020). *Juba Agreement for Peace in Sudan Between the Transitional Government of Sudan and the Parties to Peace Process* <https://constitutionnet.org/sites/default/files/2021-03/Juba%20Agreement%20for%20Peace%20in%20Sudan%20-%20Official%20ENGLISH.PDF>, diakses pada 18 April 2022.
- Nashed, M. (25 April 2022). *Six Months Since Coup, Sudan Promises to Keep Up Democracy Fight*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/25/sudan-six-months-into-a-coup-the-fight-for-democracy-is-ongoing>, diakses pada 11 Mei 2022.
- Rahman, K. (2021). *Overview of Corruption and Anti-Corruption in Sudan*. Transparency International, CMI U4 Anti-Corruption Resource Centre.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed methods, Serta Research and Development*. Pusaka Jambi.
- Sudan Information Service. (20 Mei 2021). *Sudan Uprising Report: Build-up to the military coup of 25 October*. <https://www.sudaninthenews.com/political-briefings>, diakses pada 22 April 2022.
- Sultan, Z. (13 April 2019). *How the press emerges from the coup in Sudan*. <https://www.cjr.org/watchdog/media-sudan-bashir-press.php>, diakses pada 15 April 2022.
- The Republic of Sudan. (2019). *Sudan Constitutional Declaration August 2019* https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Sudan%20Constitutional%20Declaration_Arabic_Final.pdf, diakses pada 18 April 2022.
- The Rift Valley Institute (RVI). (2021). *Voting for Change: Elections and Political Transformation in Sudan*. Rift Valley Institute Report.
- Wanyoike, W. (4 Agustus 2019). *Sudan's Constitutional Charter is a Ray of Hope but Tough Times Lie Ahead*. <http://www.iconnectblog.com/2019/08/sudans-constitutional-charter-is-a-ray-of-hope-but-tough-times-lie-ahead/>, diakses pada 18 April 2022.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Terjemahan: Zia Anshor. PT. Gramedia Pustaka Utama.